

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 8	No. 1	Hal. 1 - 90	Jakarta Juni 2018	ISSN 2089-6980
--------------------------------	--------	-------	-------------	----------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **30/E/KPT/2018**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 8 Nomor 1, Juni 2018

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:

Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Asep Agus Handaka, S. Pi, MT (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Redaksi Pelaksana :

Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A

Andrian Ramadhan, S. Pi, MT

Hertria Maharani Putri, MBA

Hakim Miftahul Huda, M.Si

Edwin Yulia Setyawan, S.T

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S. Ikom

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: pt.losek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 8 Nomor 1, Juni 2018 adalah:

1. Prof. Dr. Sonny Koeshendrajna (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
2. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*)
3. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A (*Antropologi - Universitas Gajah Mada*)
4. Dr. Rilus a kinseng (*Sosiologi - Institut Pertanian Bogor*)
5. Dr. Taryono (*Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - Institut Pertanian Bogor*)
6. Dr. Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si (*Ekonomi Keluarga - Institut Pertanian Bogor*)
7. Benny Osta Nababan, M.Si (*Ekonomi Sumber daya - Institut Pertanian Bogor*)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing Jakarta Utara; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Tradisional: Studi di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; (iii) Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalan Pasir Pantai di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke; (iv) Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar di Tinjau Dari Aspek Kependudukan; (v) Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara; (vi) Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru, dan; (vii) Penilaian Sosial Dalam Membangun Entitas Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, Natuna.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 8 Nomor 1, Tahun 2018

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA <i>Oleh : Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution</i>	1 - 12
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI <i>Oleh : Herna Octivia Damayanti</i>	13 - 26
STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE <i>Oleh : Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin</i>	27 - 38
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN <i>Oleh : Fadjri Alihar</i>	39 - 51
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA <i>Oleh : Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan Bet E. S. Lagarene</i>	53 - 62
SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU <i>Oleh : Retno Widiastuti dan Latifatul Rodiyah</i>	63 - 75
PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA <i>Oleh : Armen Zulham</i>	77 - 90

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN
DI CILINCING JAKARTA UTARA

*Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In
The Cilincing of North Jakarta*

Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.

Kata Kunci: reklamasi; Teluk Jakarta; Cilincing; perubahan sosial; masyarakat nelayan

ABSTRACT

The development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.

Keywords: *reclamation; Jakarta Bay; cilincing; social change; fishing community*

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI KASUS DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

Strategy For Developing Traditional Fishing Bussiness: Case Study in The Pecangaan Village, Batangan Subdistrict of Pati Regency

Herna Octivia Damayanti

ABSTRAK

Produktivitas yang rendah merupakan salah satu ciri umum nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Data primer berasal dari 55 sampel responden (nelayan di Desa Pecangaan) dan data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metoda analisis *Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT)* dan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. Hasil penelitian memberikan ilustrasi strategi pengembangan sebagai berikut. Strategi pertama adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pengembangan akses pemasaran, strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim, dan strategi keenam adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal.

Kata Kunci: Desa Pecangaan; perikanan tangkap tradisional; QSPM; strategi pengembangan; SWOT

ABSTRACT

Low of productivity is a one of common characteristics of traditional fishing business. This research aimed at formulating a priority development strategy in order to improve the traditional fishing bussiness in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. The research uses a descriptive method with quantitative and qualitative approach and was conducted in October 2016 in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. Primary data comes from 55 respondents were selected as a sample (fishers in the Pecangaan village) and secondary data ere collected from Government of the Pecangaan village level of Batangan Subdistrict. The sample was 55 people. Data was analyzed by using Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis methods. Results of the research are: the first strategy is namely the increase of fishing productivity with the use of modern fishing gear. The second strategy is supervision and giving strict sanctions on fishing gear which is not environmentally friendly, the third strategy is the change of sales management through auction process in fish auction and development of marketing access, the fourth strategy is to improve the quality of human resources, the fifth strategy is coaching related to the impacts of climate change, and the sixth strategy is the ease of capital lending.

Keywords: Pecangaan Village; tradisional fishing; QSPM; strategy for development; SWOT

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE

Policy Strategy to Overcome Beach Sand Mining in The Nasai Beach – Merauke Regency

Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin

ABSTRAK

Penambangan pasir pantai menimbulkan eksternalitas. Bentuk eksternalitas yang terlihat adalah kerusakan jalan raya, penurunan produktivitas produk perikanan, dan kerusakan ekosistem hutan *mangrove* di pesisir pantai. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan pelarangan penggalian pasir pantai, namun ekstraksi penggalian pasir di pesisir pantai masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir melalui analisis motivasi dan persepsi masyarakat terhadap usaha penggalian pasir pantai dengan pendekatan metodologi analisis *Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT)* dan penentuan alternatif strategi

ABSTRACT

Beach sand mining caused externalities. Those type of externalities were shown by road damage, decreasing fisheries productivity, and destruction of mangrove forest ecosystems in coastal areas. Government has prohibited beach sand mining, however, extraction continues to occur. This study aims to analyze the policy strategy to overcome beach sand mining through motivation analysis and perception of community using the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analytical methods. Results of the study showed that people sell sand due to economic reason without having to work hard, its stable production and

dengan metode *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi masyarakat menjual pasir karena tuntutan ekonomi, tidak perlu bekerja keras, hasilnya stabil dan harga tidak pernah turun dibandingkan usaha pertanian. Adanya anggapan menjual pasir adalah pekerjaan sampingan. Jika tidak ada permintaan pasir, maka masyarakat akan berkebun, berburu, meramu dan mengambil ikan di laut. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pasir. Masyarakat paham dampak negatif penggalian pasir dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan penggalian pasir. Kebijakan pemerintah tidak ditegakkan dan terjadi penelantaran diduga sebagai penyebab tetap dilakukan praktek penambangan pasir pantai. Urutan strategi kebijakan yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan analisis QSPM adalah: (1) penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas; (2) penegakan ijin usaha pertambangan dan (3) membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

Kata Kunci: strategi kebijakan; eksternalitas; penggalian pasir pantai; metoda SWOT; metoda QSPM

prices compared to agriculture activity. Selling sand is considered a temporary job. Whenever there is no demand for sand, the community will work for another job, i.e., hunting, fishing and other agricultural activities. Community is aware of negative impact of sand mining and it empower them to prevent sand mining. A weak enforcement of government policy was likely to be the reason of keep practicing beach sand mining. The policy strategy that we suggest for government to overcome the beach sand mining based on the QSPM analysis are: (1) determining the price of local sand by internalizing the externalities cost; (2) law enforcement of sand mining business permits, and; (3) establishing coastal environmental groups to develop other economic activities for local people.

Keywords: policy strategy; externalities; beach sand mining; SWOT method; QSPM method

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJAUAN DARI ASPEK KEPENDUDUKAN

Policies on The Management of The Outer Islands According to Population Aspect

Fadjri Alihar

ABSTRAK

Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kata Kunci: penduduk pulau-pulau terluar; daerah perbatasan dan transmigrasi

ABSTRACT

There are several issues related to the outer islands in Indonesia. First, security aspects relating to aspects of conservation and management. Second, many of these islands are uninhabited. Third, the aspect of community empowerment. This paper tries to explore various data, both research results, academic texts and various data from the internet to understand the various problems that occur in Indonesia's outer islands. Qualitative descriptive analysis method was used in this study. The results of the study indicate that the Indonesian Government has undermined the problems that occur in the outer islands, even though it concerns the self-respect and dignity of the nation. The government is required to re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring countries. In addition, the government is also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration program is needed which is equipped with marine and island-based knowledge and skills.

Keywords: inhabitant; island; nation or state-border; transmigration

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA**

***Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village,
Sangihe Islands Regency of North Sulawesi***

Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan Bet E. S. Lagarene

ABSTRAK

Pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe telah banyak diteliti namun penelitian yang menekankan pada pengembangan potensi pariwisata pesisir desa bentung belum dilakukan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan PERDA Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Desa Bentung mempunyai atraksi wisata Mairokang Beach Game (MBG) yang diselenggarakan setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi produk-produk wisata yang masih banyak selain lomba MBG. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 menggunakan metode observasi, kualitatif dan kuantitatif (campuran). Metoda analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulu, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan perlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Kata Kunci: strategi pengembangan pariwisata; pesisir; Sesa Bentung; Mairokang Beach Game

ABSTRACT

Management of Sangihe coastal tourism has been extensively researched; however, research emphasizing on the development of coastal tourism potentials in Bentung Villages has yet been carried out. The regency of Kepulauan Sangihe which is a maritime regency has a Tourism Strategic Area in Sangihe Islands Local Regulation No. 15 Year 2008 which tell that a region that has a major function of tourism or has potential for tourism development that has an important influence in one or more aspects such as economic, social and cultural growth, natural resources empowerment, environmental carrying capacity, defense and security. Bentung Village a tourist attraction such as Mairokang Beach Game (MBG) that held annually. This study focuses on the development of coastal tourism attractions in the village of Bentung with a diversified form of tourism products that are still many other than the MBG competition. This research was conducted between October 2016 until March 2017 using qualitative and quantitative observation method (mix method). A descriptive and SWOT analysis were used in this study. Results of the research showed that potential of coastal resources in Bentung Village such as coral reefs, mangrove forest has an area of 2.82 Ha and classified as undamaged. Bentung Beach tourism has three areas that have different sand such as Bulu Beach, Nagha Beach and Mairokang Beach. MBG carries out cultural activities of Sangihe and becomes a tourist attraction of Kepulauan Sangihe Regency, This attraction is a boat racing competition. The research suggests the need to be focused on the development of tourism's infrastructure and facilities.

Keywords: tourism development strategy; coastal; Bentung Village; Mairokang Beach Game

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU

Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands

Retno Widihastuti dan Latifatul Rodiyah

ABSTRAK

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awak kapal/perahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik. Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Kata Kunci: sistem bagi hasil; anak buah kapal; Kepulauan Aru; upah minimum regional; modal, pendampingan

ABSTRACT

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awak kapal/perahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik. Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Keywords: profit sharing system; lowest crews member; Aru Islands, regional minimum wage, capital; assistanships

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, Natuna

Armen Zulham

ABSTRAK

Kehadiran nelayan asing pelaku *Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing)* pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku *IUU Fishing* pada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena konstruksi sosialnya masih *premature* sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Penilaian sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancarai 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.

Kata Kunci: perikanan; Natuna; struktur sosial; jaringan sosial

ABSTRACT

The presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

Keywords: *fishing; Natuna; social structure; social networking*



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Balitbang KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.losek@gmail.com

ISSN **2089-6980**

